



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

Jl. Lembaga Bolangi, Pattalassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Laman : www.rudenimakassar.kemenkumham.go.id, Pos-el : rdnm.makassar@kemenkumham.go.id

Nomor : WIM.23.IMI.PR.03-5976 31 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Rumah Detensi Imigrasi Makasar Tahun 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
di-
tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Atang Kuswana



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

20
24



KATA PENGANTAR



kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan LKjIP ini, juga merupakan perwujudan akutanbilas dan transparansi kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang memuat capaian-capaian dari target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun. LKjIP ini diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Selain itu, Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan Kanwil Sulawesi Selatan dimasa yang akan datang.



Gowa, 31 Desember 2024
Kepala Kantor,




Ditandatangani secara elektronik oleh :

Atang Kuswana


IKHTISAR EKSEKUTIF

1




REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
PAGU : Rp. 16.727.632.000
REALISASI : Rp. 16.581,607,934 (99.12%)

2

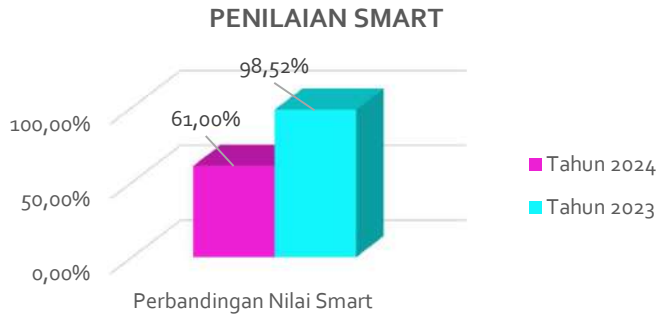
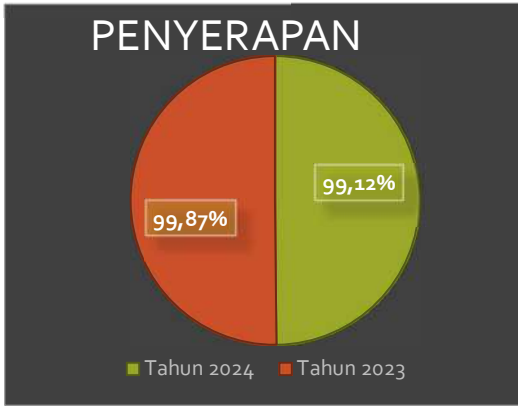
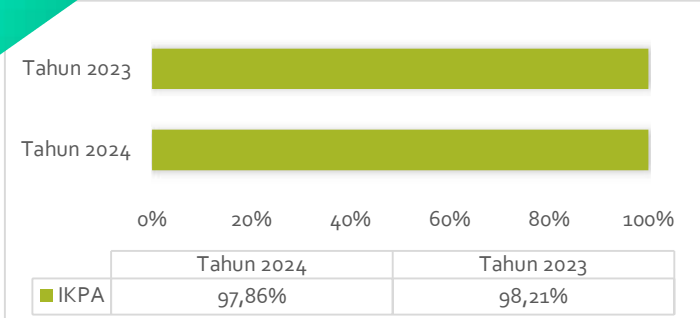


IKPA TAHUN 2024
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024 SEBESAR 97.86%

3



SMART TAHUN 2024
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU SEBESAR 61.00%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Detensi Imigrasi kepada publik dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan perwujudan dari akuntabilitas capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar selama 1 (satu) Tahun, untuk menggambarkan serta mendorong transparansi capaian kinerja terhadap berbagai sasaran strategi sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kinerja berikut permasalahan dan sejumlah hal yang memerlukan perbaikan dan juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. hal tersebut sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang terdiri dari:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Tabel : total pagu rumah detensi imigrasi makassar Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.249.086.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.249.086.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.535.971.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10.535.971.000,-

Pada Bulan Januari Tahun 2024, Rumah Detensi Imigrasi Makassar memperoleh Pagu sebesar Rp.12.785.057.000, dan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk Program pelayanan serta penegakan Hukum dan Dukungan Manajemen di Rumah Detensi Imigrasi Makassar, memasuki Bulan Juni Tahun 2024 Rumah Detensi Imigrasi memperoleh ABT (Anggaran Belanja Tambahan) Sebesar Rp.3.942.575.000, Sehingga Rumah Detensi Imigrasi Makassar setelah mendapatkan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) memperoleh Total pagu sebesar Rp. 16.727.632.000 dan telah berhasil direalisasikan sampai bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 16.581.607.934 (99.12%). Pemanfaatan anggaran tersebut diharapkan memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dengan tetap berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Rumah Detensi Imigrasi Makassar selama Satu Tahun ini telah melakukan beberapa kegiatan keimigrasian antara lain Pendetensian, Resettlement, Pemindahan antar Rudenim, Deportasi, serta melakukan kegiatan pengawasan dan penanganan pengungsi dari luar negeri yang melibatkan langsung masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi dalam rangka penanggulangan masalah-masalah pengungsi dari luar negeri yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan.....	11
D. Aspek Strategis	12
E. Isu Strategis	13
F. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	16
B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar	23
B. Realisasi Anggaran	35
C. Capaian Kinerja Anggaran	37
D. Capaian Kinerja Lainnya	39
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
LAMPIRAN	49
• Perjanjian Kinerja Tahun 2024	



BAB I

PENDAHULUAN

Informasi Tentang Kondisi Gambaran Umum
Rumah Detensi Imigrasi Makassar



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

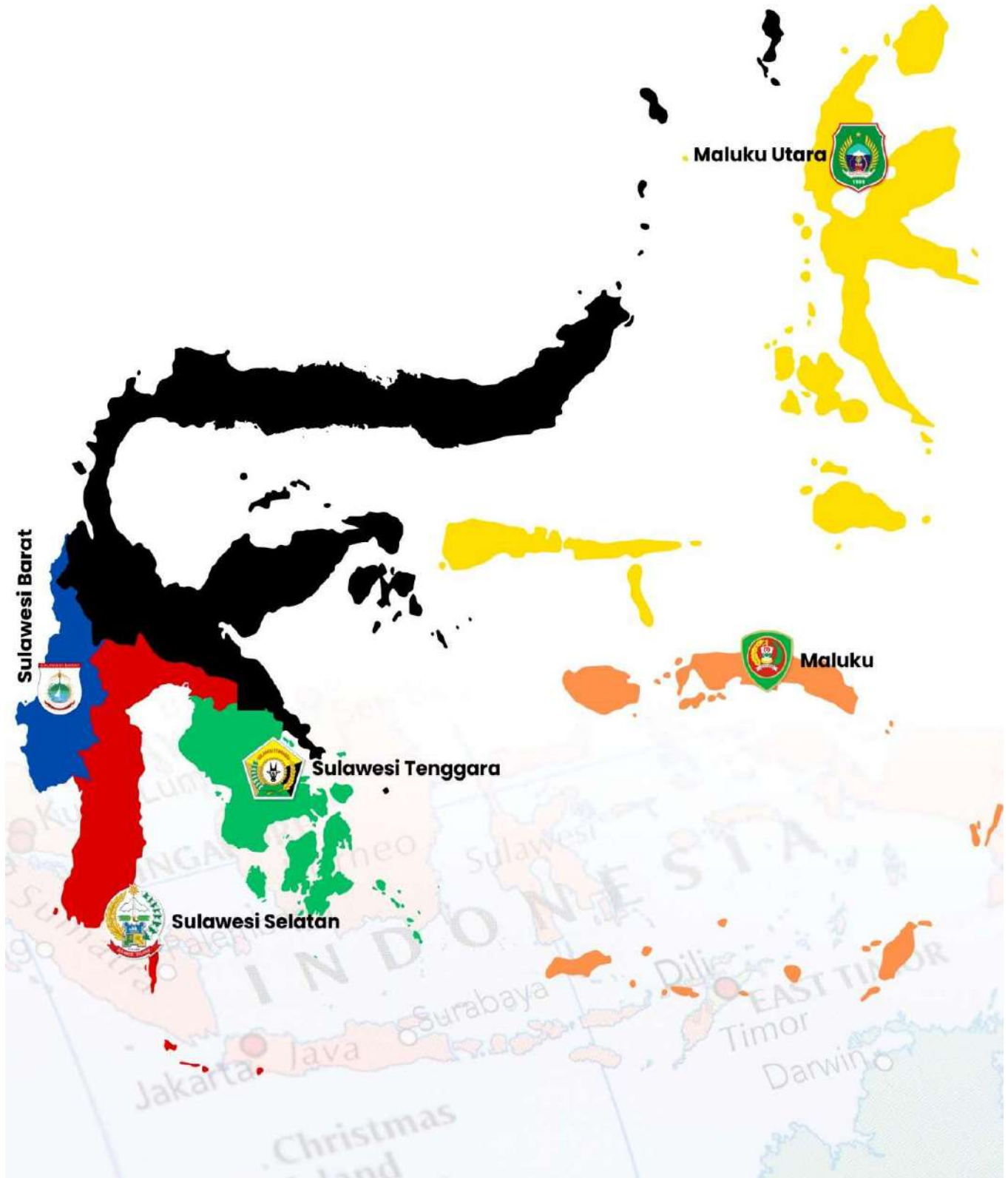
Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas di bidang keimigrasian berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PR.07.01 Tahun 2004 dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang Pendetensian Orang asing, selain itu Rumah Detensi Imigrasi Makassar mendapatkan tugas tambahan dibidang pengawasan terhadap pengungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global), 2. Pembangunan Infrastruktur (Melanjutkan Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendokrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat), 3. Penyederhanaan Regulasi (Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, undang-undang cipta lapangan kerja, kedua, undang-undang pemberdayaan UMKM), 4. Penyederhanaan Birokrasi (Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi) dan 5. Transformasi Ekonomi (Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Sebagai bagian dari instansi vertikal pemerintah, Rumah Detensi Imigrasi Makassar wajib melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rumah Detensi Imigrasi Makassar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Hukum Keimigrasian.

Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara,
Maluku dan Maluku Utara



B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang Keimigrasian dilingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan. Tugas Rudenim yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang Pendetensian orang asing.



Rudenim Menjalankan Fungsi antara lain :

- 1** Melaksanakan Tugas Pendetensian
- 2** Melaksanakan Tugas Pengisolasian
- 3** Melaksanakan Tugas Pemulangan dan Pengusiran/Deportasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi Pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar memiliki 1 (Satu) Sub Bagian dan 3 (Tiga) Seksi yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, dan Rumah Tangga Rudenim berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu:

- a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian;
- b. Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- c. Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

2. Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan

Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pencatatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda pribadi, serta melakukan pemulangan terdetensi dan pelaporannya, Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi;

- a. Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumen sidik jari, foto, dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu:

a. Subseksi Seksi Registrasi

Subseksi Seksi Registra mempunyai tugas melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan serta mengamankan benda-benda pribadi terdetensi;

b. Subseksi Administrasi, dan Pelaporan

Subseksi Administrasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.

3. Seksi Perawatan dan Kesehatan

Seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan, dan kegiatan olah raga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Seksi Perawatan dan kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- b. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Seksi Perawatan dan Kesehatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu:

- a. Subseksi Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- b. Subseksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

4. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar rudenim serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keamanan dan ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan dilingkungan rudenim;
- b. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar rudenim, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya;

Seksi Keamanan dan Ketertiban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu :

- a. Subseksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan dilingkungan rudenim;
- b. Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

Dibawah ini merupakan bagan susunan struktur organisasi Rumah Detensi Imigrasi Makassar (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.04 Tahun 2004 Tanggal 9 Maret 2004). yang mencakup :

- ❖ Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar
- ❖ Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi: Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian dan Urusan Umum
- ❖ Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan yang meliputi: Sub Seksi Registrasi dan Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan
- ❖ Seksi Keamanan dan Ketertiban yang meliputi: Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Ketertiban
- ❖ Seksi Perawatan dan Kesehatan yang meliputi : Sub Seksi Perawatan dan Sub Seksi Kesehatan



STRUKTUR ORGANISASI

RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR



**KEPALA RUMAH DETENSI
IMIGRASI MAKASSAR**
ATANG KUSWANA, SH



**KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA**
YUSA SETIA BUDI, A.MD.IM., S.H., M.H.



**KEPALA URUSAN
KEPEGAWAIAN**
ANDI BAHTIAR, SH, MH



**KEPALA URUSAN
UMUM**
A. DEWI RACHMADANI, S.H.



**KEPALA URUSAN
KEUANGAN**
RUDY GUNAWAN, S.H.



**KEPALA SEKSI
KEAMANAN & KETERTIBAN**
ACHMADIN KURNIAWAN, S.Sos



**KEPALA SEKSI REGISTRASI
ADMINISTRASI & PELAPORAN**
IWAN, S.E



**KEPALA SEKSI
PERAWATAN & KESEHATAN**
HAMANZAH, SH



**KEPALA SUB
SEKSI KEAMANAN**
RUDI HARTONO, SH



**KEPALA SUB
SEKSI KETERTIBAN**
NURJAYADI, S.Sos



**KEPALA SUB
SEKSI REGISTRASI**
AHMAD RIFAI, SE, MH



**KEPALA SUB
SEKSI ADM & PELAPORAN**
RAFIAH, SH

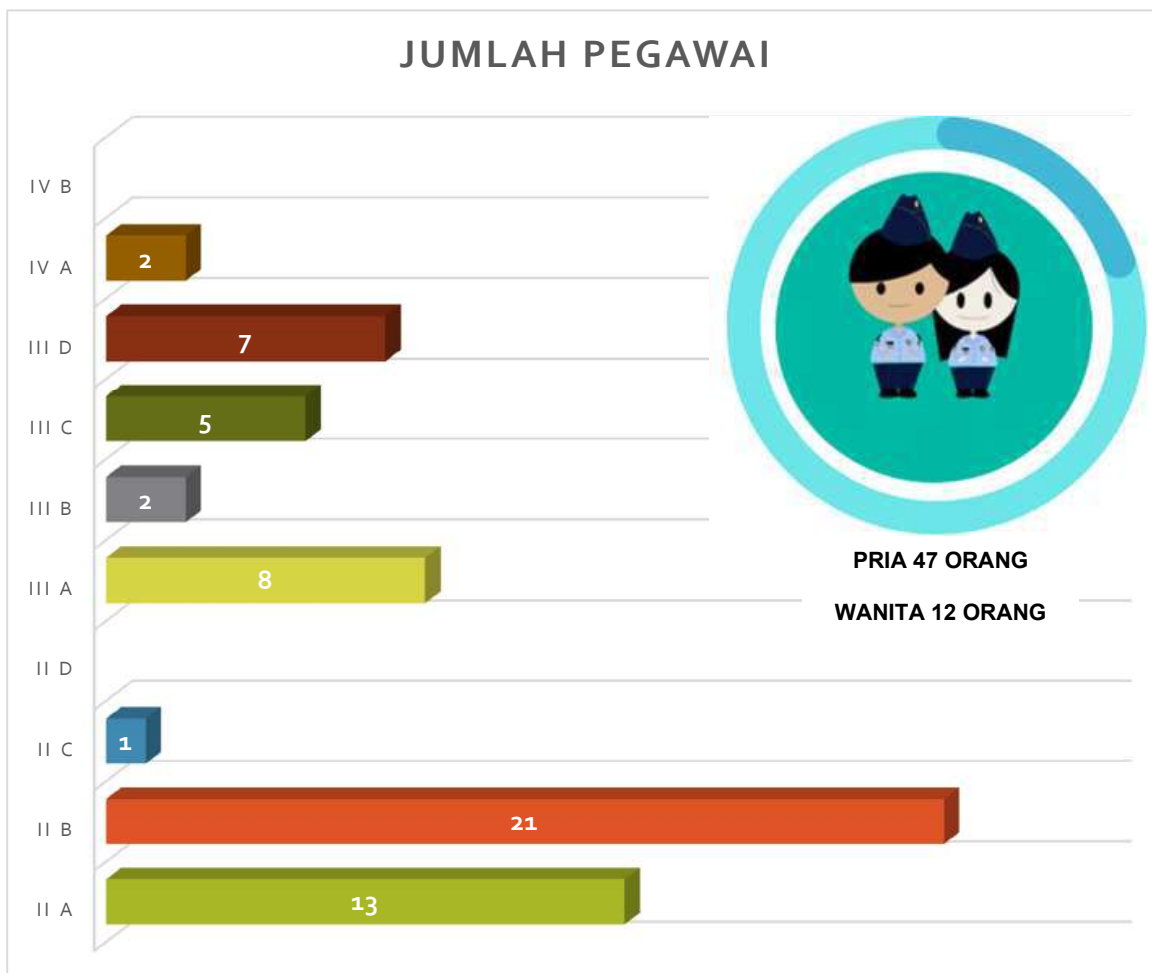


**KEPALA SUB
SEKSI PERAWATAN**
HASBIADI, SH



**KEPALA SUB
SEKSI KESEHATAN**
H.J. EKO HERAWATI H., SH

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Rumah Detensi Imigrasi Makassar didukung sumber daya manusia sebanyak **59 (Lima Puluh Sembilan) Orang Pegawai** keadaan per bulan Desember 2024, dengan komposisi sebagai berikut:



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang diberi kepercayaan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP Rumah Detensi Imigrasi Makassar tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Rumah Detensi Imigrasi Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Rumah Detensi Imigrasi Makassar:

1. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
2. Mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
3. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian;
4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.
5. Pelaksanaan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Detensi Imigrasi Makassar seringkali dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan dapat menghambat pencapaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar dengan rincian sebagai berikut:

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN
Seksi Perawatan dan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memadainya peralatan kesehatan 2. Tingginya Tingkat stress diakibatkan ketidakjelasan waktu pendeportasian
Seksi Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung utama. 2. Masih apatisnya seksi lain terhadap penanganan deteni dan imigratoir, sehingga melimpahkan tanggung jawab penanganan deteni dan imigratoir hanya ke seksi keamanan dan ketertiban

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN

SUBBAG TU	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah SDM 2. Pengarsipan dokumen kepegawaian belum sesuai kaidah kearsipan 3. Terdapat Pejabat Struktural yang belum mengikuti pelatihan Diklat Kepemimpinan (DIKLATPIM) 4. Kurangnya jumlah pelatihan tentang kepegawaian 5. kekurangan pagu untuk alokasi belanja Pegawai 6. Postur RKA-K/L sering mengalami perubahan 7. Belum tertibnya pencatatan Barang Milik Negara 8. Integrasi penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) belum maksimal 9. Penerimaan surat melalui e-mail masuk (rudenmks@yahoo.co.id) sering tidak dibuka oleh staf 10. Belum dan yang lulus diklat Bendaharawan 11. Pengisian LHKS N Pegawai belum optimal 12. Prasarana Utama (laptop) yang digunakan untuk keperluan Rekonsiliasi BMN (SIMAN) tidak optimal 13. Lambatnya jaringan internet (server) untuk unduh surat masuk dari e-mail 14. Proses kaderisasi kurang, sehingga Ketika seorang pegawai mengisi jabatan baru, pengetahuan tentang jabatan barunya masih sangat kurang 15. Pemeliharaan kendaraan roda 4 tidak maksimal yang diakibatkan oleh rendahnya anggaran pemeliharaan

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN
Seksi Reg. Admin dan Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Jumlah SDM 2. Tidak terlaksananya integrasi aplikasi e-office (aplikasi Rudenim) 3. Aplikasi Simkin yang diharapkan bisa memudahkan migrasi data pengungsi luar negeri, ternyata tidak optimal dan sering mengalami error 4. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas 5. Pengungsi masih banyak yang belum menggunakan aplikasi E-motion yang pembuatan diharapkan meminimalisir pengungsi untuk datang langsung ke Rudenim sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi, akibatnya aduan dan wajib lapor pengungsi setiap bulannya masih dilakukan pengungsidengan cara mengunjungi Rudenim yang membuat pengungsi 6. mengeluarkan biaya transportasi Pengiriman surat yang sifatnya penting tidak terkordinir dengan cepat. 7. Beberapa staf belum terlalu mahir menjalankan aplikasi-aplikasi yang dioperasikan melalui PC

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2024
- IKHTISAR EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar tahun 2024
- BAB I** : **PENDAHULUAN**
- Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis, isi strategis, dan sistematika laporan
- BAB II** : **PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024**
- Informasi tentang perencanaan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang menyajikan rencana strategis organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta Perjanjian Kinerja yang menyajikan dokumen untuk melaksanakan kegiatan yang disertai indikator kinerja berdasarkan anggaran yang telah disetujui
- BAB III** : **AKUNTABILITAS KINERJA**
- Menguraikan analisis pencapaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja serta analisis capaian kinerja keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Makassar berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar

BAB IV

: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Selama Tahun 2024 beserta saran untuk perbaikan di masa mendatang

Lampiran

- Perjanjian Kinerja tahun 2023
- Perjanjian Kinerja tahun 2024
- Prestasi dan Penghargaan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan, Penetapan dan Perjanjian
Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi

tersebut juga diemban juga oleh Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Visi tersebut berbunyi:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

1. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
2. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
3. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan
4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan kelembagaan.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk

sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Rumah Detensi Imigrasi Makassar berkomitmen terus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas instansi Pemerintah bukan hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat salah satunya standar pelayanan publik yang berkualitas.

Rumah Detensi Imigrasi Makassar terus memberikan pelayanan secara akuntabel, transparan dan profesional, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rumah Detensi Imigrasi Makassar terus berbenah untuk menjadi lebih baik, dengan mengembangkan inovasi-inovasi baru yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi Keimigrasian, memudahkan warga negara asing (Deteni) untuk memperoleh informasi dari kedutaan serta keluarganya dan memudahkan kelengkapan dokumen warga negara asing dalam rangka pemulangan/deportasi, semua bentuk pelayanan ini sebagai perwujudan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat.

Adapun Visi dan Misi Rumah Detensi Imigrasi Makassar sebagai Berikut :

VISI

“ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Misi

1. Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia;

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi kementerian hukum dan hak asasi manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur kementerian hukum dan hak asasi manusia yang profesional dan berintegritas.

• Tata Nilai

Dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama;

Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;

Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

• Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah penggambaran dari pelaksanaan visi dan misi Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi antara lain :

- ❖ Mewujudkan aparatur keimigrasian yang semakin akuntabel, professional, transparan serta inovatif ;
- ❖ Terwujudnya penegakan hukum yang adil kepada semua masyarakat;
- ❖ Terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik dan prima;
- ❖ Terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- ❖ Terwujudnya keamanan masyarakat terhadap lalu lintas orang asing;
- ❖ Terwujudnya kemudahan dalam mengakses informasi keimigrasian;

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka pelaksanaan sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Rumah Detensi Imigrasi Makassar pada tahun 2024 pada Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024, khususnya pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar, terkendala oleh beberapa hal yakni:

- ❖ Belum sepenuhnya dipahami Sasaran Kinerja dan Indikator kinerja Utama dengan capaian output program;
- ❖ Penanganan pengungsi di Indonesia masih lemah, hal ini disebabkan payung hukum penanganan pengungsi masih belum mempunyai juklak dan juknis;
- ❖ Orta Rudenim masih menggunakan orta lama;
- ❖ Tumpang tindih tugas dengan Kantor Imigrasi; dan
- ❖ Terjadinya pelanggaran oleh Pengungsi yang penanganannya diserahkan ke Rumah Detensi, hal ini dapat menyebabkan persoalan hukum, mengingat bahwa Deteni adalah Orang Asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian dan akan ditempatkan sementara pada Rumah Detensi.

Rumah Detensi Imigrasi Makassar memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada 3 (tiga) program. Sasaran kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Divisi Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar merupakan frame work pelaksanaan tugas dan fungsi, selain itu guna mewujudkan Rumah Detensi Imigrasi Makassar memperoleh predikat Wilayah bebas Korupsi, dilakukan berbagai upaya

dan sinergitas dengan berbagai stakeholder terkait.

Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Detensi Imigrasi Makassar yakni Rumah Detensi Imigrasi Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang secara struktural organisasi bertanggungjawab terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Sehingga berdasarkan struktur organisasi tersebut terjadi keterkaitan satu sama lain, rencana strategis kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar Merupakan perwujudan Komitmen Bersama untuk peningkatan kinerja pada jajaran satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Tabel : Total Pagu Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.249.086.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.249.086.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.535.971.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10.535.971.000,-

Tahun Anggaran 2024 Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan, dengan DIPA Nomor : DIPA-013.06.2.664675/2024 tanggal 24 November 2023 dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 12.785.057.000,-** (Dua Belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada bulan Juni 2024 telah disetujui Revisi DIPA berupa penambahan ABT pada belanja modal sebesar Rp. 3.942.575.000, sehingga jumlah keseluruhan Pagu Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Makassar menjadi **Rp. 16.727.632.000,-** (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah),.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja dan Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja unit pelaksana teknis Rumah Detensi Imigrasi Makassar, dengan menjelaskan berbagai pencapaian kinerja organisasi selama Tahun 2024 beserta analisisnya. Pengukuran Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

A. CAPAIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Rumah Detensi Imigrasi Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Detensi Imigrasi Makassar tahun 2024 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar tahun 2024 diimplementasikan melalui Sasaran Kegiatan berupa 'Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan' dan 'Meningkatnya pelayanan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi' Sedangkan indikator kinerja kegiatan tersebut memiliki 3 (tiga) Indikator berupa "Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani", Presentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi", dan "Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan".

SASARAN KEGIATAN 1
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 1
 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2024, Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA	KEWARGA-NEGARAAAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PEMULANGAN	TINDAKAN		KET
				TAK	PRO JUSTISIA	
1	CHINONSO STANLEY NNOYIM	NIGERIA	W.23.IMI.IMI.4-253.GR.03.08 TAHUN 2024	PENDEPORTASIAN	-	01 FEBRUARI 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
2	DANIEL ANTON BUHRER	AUSTRALIA	W.23.IMI.IMI.4-812.GR.03.08 TAHUN 2024	PENDEPORTASIAN	-	21 MARET 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI
3	MARSHAL KEYS	AFRIKA SELATAN	W.23.IMI.IMI.4-963.GR.03.08 TAHUN 2024	PENDEPORTASIAN	-	28 MARET 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
4	SAMI MRICH	MAROKO	W.23.IMI.IMI.4-1683.GR.03.08 TAHUN 2024	PENDEPORTASIAN		22 MEI 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
5	EMMANUEL SENA TUNU	GHANA	W.23.IMI.IMI.4-1737.GR.03.08 TAHUN 2024	PENDEPORTASIAN		28 MEI 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA

6	NDUKWE ENYERIBE JUDE	NIGERIA	W.23.IMI.IMI.4- 1810.GR.03.08 TAHUN 2024	PENDEPORTASIAN		04 JUNI 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO- HATTA
7	YANG ZHANKE	CHINA	W.23.IMI.IMI.4- 3168.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 15 AGUSTUS 2024	PENDEPORTASIAN		16 AGUSTUS 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO- HATTA
8	ZHOU SHILONG	CHINA	W.23.IMI.IMI.4- 3168.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 15 AGUSTUS 2024	PENDEPORTASIAN		16 AGUSTUS 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO- HATTA
9	ZHANG MINGZHOU	CHINA	W.23.IMI.IMI.4- 3168.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 15 AGUSTUS 2024	PENDEPORTASIAN		16 AGUSTUS 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO- HATTA
10	LI WENNING	CHINA	W.23.IMI.IMI.4- 3168.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 15 AGUSTUS 2024	PENDEPORTASIAN		16 AGUSTUS 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO- HATTA
11	ZHANG JIALIANG	CHINA	W.23.IMI.IMI.4- 3168.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 15 AGUSTUS 2024	PENDEPORTASIAN		16 AGUSTUS 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO- HATTA
12	YANG XUFENG	CHINA	W.23.IMI.IMI.4- 3168.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 15 AGUSTUS 2024	PENDEPORTASIAN		16 AGUSTUS 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO- HATTA
13	WANG HUIBIN	CHINA	W.23.IMI.IMI.4- 3168.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 15 AGUSTUS 2024	PENDEPORTASIAN		16 AGUSTUS 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO- HATTA

14	GAJER BIN IBNO	MALAYSIA	W.23.IMI.IMI.4-3491.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 27 AGUSTUS 2024	PENDEPORTASIAN		29 AGUSTUS 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
15	OKOLIE CHIGOZIE TIMOTHY	NIGERIA	W.23.IMI.IMI.4-3562.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 30 AGUSTUS 2024	PENDEPORTASIAN		03 SEPTEMBER 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
16	RENO NUSA OFIDE	PAPUA NUGINI	W.23.IMI.IMI.4-4076.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024	PENDEPORTASIAN		25 SEPTEMBER 2024 POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) SKOUW, JAYAPURA
17	OUSSAMA MANSOURI	TUNISIA	W.23.IMI.IMI.4-4678.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 16 OKTOBER 2024	PENDEPORTASIAN		18 OKTOBER 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
18	SATO AKIRA	JEPANG	W.23.IMI.IMI.4-5553.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 02 DESEMBER 2024	PENDEPORTASIAN		05 DESEMBER 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
19	TAUZI LAZARO MSUWA	TANZANIA	W.23.IMI.IMI.4-5553.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 02 DESEMBER 2024	PENDEPORTASIAN		05 DESEMBER 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
20	MOUSTafa MOHAMED ABDELLATIF ABDELLATIF	MESIR	W.23.IMI.IMI.4-5553.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 02 DESEMBER 2024	PENDEPORTASIAN		05 DESEMBER 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
21	JAGDEV SINGH	INDIA	W.23.IMI.IMI.4-5734.GR.03.08 TAHUN 2024 TANGGAL 10 DESEMBER 2024	PENDEPORTASIAN		12 DESEMBER 2024 TPI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA

Untuk mendapatkan nilai persentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani Rumah Detensi Imigrasi Makassar selama

tahun 2024 dilakukan perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administratif keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total Kasus pelanggaran administratif keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$
$$= \frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$$

Dengan hasil persentase tersebut, dapat diperoleh realisasi persentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani Rumah Detensi Imigrasi Makassar selama tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 90% atau dengan capaian sebesar 111% dengan perhitungan capaian sebagai berikut:

Realisasi tindakan administratif keimigrasian

Target tindakan administratif keimigrasian x 100%

$$= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111%

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani Rumah Detensi Imigrasi Makassar pada tahun 2024 telah tercapai.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dalam renstra tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya.

4. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar menandakan bahwa proses penanganan penegakan hukum keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Makassar sudah baik. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penanganan pengungsi Satgas PPLN di Kota Makassar;
- 2) Tumbuhnya kepercayaan masyarakat pemilik *Community House (CH)* sebagai

tempat penampungan pengungsi yang semakin baik, dalam hal adanya saling tukar informasi setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi;

- 3) Penyebaran informasi seluruh kegiatan secara rutin oleh TIM Humas dengan memanfaatkan website dan media sosial secara optimal Rumah Detensi Imigrasi Makassar, yang dilaksanakan secara intens kepada masyarakat.
- 4) Semakin Mudahnya Pengungsi dari Luar Negeri melakukan peneraan kartu pengungsi setiap bulan karena tidak perlu lagi harus datang ke Rudenim makassar cukup buka aplikasi e-Motion berbasis web, aplikasi ini di peruntukkan kepada pengungsi yang berada di kota Makassar, e-motion bertujuan agar pengungsi dapat melakukan peneraan kartu pengungsi setiap bulan, hal tersebut merupakan perwujudan kewajiban lapor diri pengungsi setiap bulan ke Rudenim Makassar yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Selain itu, aplikasi ini juga memangkas jarak tempat tinggal pengungsi yang tidak berada satu kota dengan Rumah Detensi Imigrasi Makassar, yaitu jarak Lapor diri, Melakukan Pengaduan, bahkan permintaan pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh pengungsi yang berkaitan dengan Tugas Rudenim.

SASARAN KEGIATAN 2

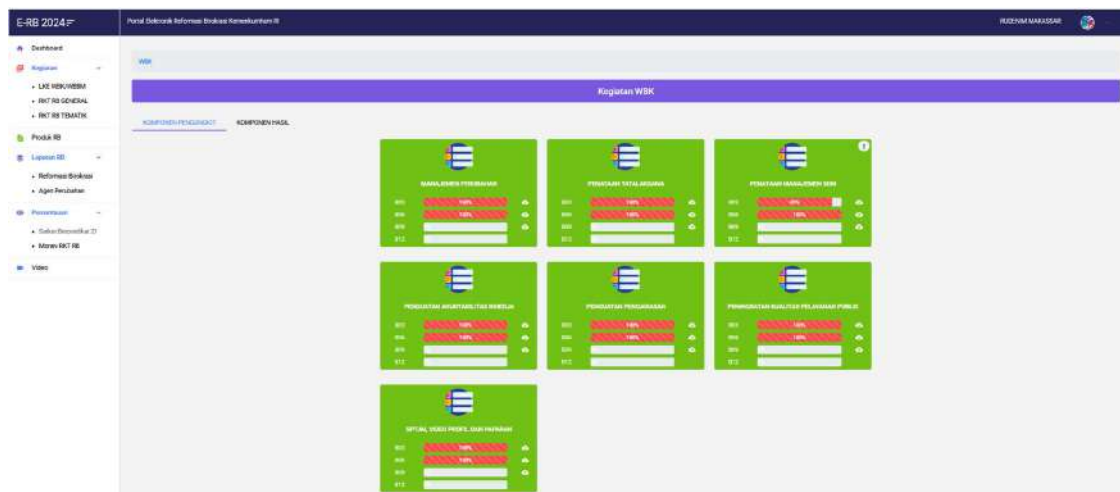
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indikator Kinerja Kegiatan 1
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur. Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Road map Reformasi Birokrasi adalah panduan dalam melaksanakan rencana kerja tahunan atau rencana aksi reformasi birokrasi serta Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemnetrian Hukum dan HAM.

Reformasi Birokrasi General (RB General) adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Pelaksanaan RB General Rumah Detensi Imigrasi Makassar tahun 2024 telah dilaksanakan dengan kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek dan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan reformasi birokrasi melalui aplikasi e- RB.



$$\frac{\text{Rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Dengan hasil persentase tersebut, dapat diperoleh realisasi persentase persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar selama tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 100% dengan perhitungan capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi layanan keimigrasian}}{\text{Target layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar pada tahun 2024 telah tercapai.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dalam renstra tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya.

4. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah terlaksana yang menandakan bahwa pelayanan keimigrasian pada Rumah

Detensi Imigrasi Makassar Telah Optimal.

Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain :

- a. Peran pimpinan dalam hal manajemen dan *role model* pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.
- c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. Melaksanakan mitigasi risiko yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang berlaku.
- f. Melakukan adaptasi dalam peningkatan penggunaan teknologi informasi guna pelaksanaan tugas dan fungsi.
- g. Melaksanakan inovasi yang menunjang pelayanan publik.
- h. Menjaga integritas pegawai di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Indikator Kinerja Kegiatan 2
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Telah dilaksanakan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan dengan jumlah responden 51 orang. Responden survei pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar melibatkan pihak internal yang terdiri dari pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum sebanyak 32 orang. Selain itu, terdapat pula pihak eksternal sejumlah 19 orang dari Pengguna layanan di luar lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

Penilaian Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2024 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut :

Satker	IPK INTERNAL		IPK EKSTERNAL		NILAI IPK GABUNG	
	Responden	Indeks	Responden	Indeks	Total Responden	Indeks
Rumah Detensi Imigrasi Makassar	32	3,5	19	3,3	51	3,4

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 32 responden internal dan 19 responden eksternal serta nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai indeks Pengamanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Makassar sebesar 3,5 indeks untuk internal dan 3,3 indeks untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{(\text{Nilai internal} \times \text{Responden Internal}) + (\text{Nilai eksternal} \times \text{Responden eksternal})}{\text{Jumlah Total responden internal dan eksternal}} \times 100\% \\
 &= \frac{(3,5 \times 32) + (3,3 \times 19)}{51} \\
 &= \frac{174,7}{51} = \mathbf{3,4}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Makassar 3,4 indeks. Capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian:

$$\frac{\text{Realisasi nilai indeks pengamanan keimigrasian}}{\text{Target nilai indeks pengamanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,4}{3,1} \times 100\% = 109\%$$

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,4 Indeks	109%

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Rumah Detensi Imigrasi Makassar pada tahun 2024 telah tercapai.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dalam renstra tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya.

4. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan capaian persentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar menandakan bahwa layanan keimigrasian yang diberikan Rumah Detensi Imigrasi Makassar sudah baik. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain :

- a. Melaksanakan pendataan pengungsi dari luar negeri secara berkala dan Laporan Harian Intelijen (LHI).
- b. Melaksanakan kegiatan Rapat PPLN secara berkala.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala demi meningkatkan penegakan hukum keimigrasian

1. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Rumah Detensi Imigrasi Makassar dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Rumah Detensi Imigrasi Makassar merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Tahun Anggaran 2024

Dari jumlah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 16.727.632.000** Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah merealisasikan sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar **Rp 16.** atau sebesar **97.73%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : Serapan anggaran

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,486,990,000	3,486,700,654	99,99%
Belanja Barang	7,043,594,000	6,923,665,248	98,29%
Belanja Modal	6,197,048,000	6,171,242,032	99,58%

Tabel : Perbandingan serapan anggaran

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
TAHUN 2023				
Belanja Pegawai	3,498,446,000	3,494,712,081	3,733,919	99,89%
Belanja Barang	4,458,597,000	4,456,806,779	1,790,221	99,96%
Belanja Modal	2,195,368,000	2,187,683,325	7,684,675	99,65%
TOTAL	10,152,411,000	10,139,202,185	13,208,815	99,87%

TAHUN 2024				
Belanja Pegawai	3,486,990,000	3,486,700,654	289,346	99,99%
Belanja Barang	7,043,594,000	6,923,665,248	119,928,752	98,29%
Belanja Modal	6,197,048,000	6,171,242,032	25,805,968	99,58%
TOTAL	16,727,632,000	16,581,607,934	146,024,066	99,12%

Tabel : Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian pelayanan dan penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	3,023,262,000	3,002,430,336	99,31%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	13,704,370,000	13,579,177,598	99,08%
TOTAL	16.727.632.000	16,581,607,934	99,12%

2. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kerja Pada Aplikasi SMART DJA

Nilai evaluasi kinerja pada aplikasi SMART Kemenkeu pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi, memperoleh nilai efisiensi rata 61,00 % , angka ini menunjukkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah memperoleh nilai Cukup dalam mencapai hasil kinerja pada Tahun 2024, selanjutnya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terkait perolehan SMART.

- **CAPTURE SMART**



2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024

Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi IKPA Kemenkeu pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi, memperoleh nilai efisiensi sebesar 97,86%, angka ini menunjukkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah memperoleh nilai Sangat Baik dalam mencapai hasil kinerja pada Tahun 2024, selanjutnya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terkait perolehan IKPA.

- **CAPTURE IKPA**

The screenshot shows the MONEVYA application interface. The main content is a table titled 'Indikator Pelaksanaan Anggaran'. The table has columns for 'KODE KPI', 'KODE IS', 'KODE MANDAT', 'URAIAN JABATAN', 'KETERANGAN', and two main sections for 'KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN' (Quality of Budget Execution) and 'KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN' (Quality of Budget Execution Results). The 'KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN' section includes sub-columns for 'RENYAI BERSI', 'BEBAN BUKLAWAH BERSI', 'PERSYARATAN ANGGARAN', 'BILANGAN BUKLAWAH', 'PELAKSANAAN ANGGARAN', and 'PENGALIHAN DANA TYP'. The 'KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN' section includes 'CAPAIAN DITARGET'. Other columns include 'NILAI TOTAL', 'SINGKAT KODET', 'BENTUK SPK PENYALANG', and 'NILAI AKHIR BUKLAWAH BERSI BUKET'. The table contains data for various months and categories, with values ranging from 0 to 100.00.

3. Capaian Kinerja Lainnya

1) Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-performance) yang Bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja, aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan, Aplikasi ini diisi setiap bulannya dengan target dan realisasi yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

- **CAPTURE E-PERFORMANCE**

The screenshot shows the E-PERFORMANCE application interface. The main content is a table titled 'PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2024 RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR'. The table has columns for 'NO', 'SASARAN', 'STRATEGIS', 'NO INDIKATOR KINERJA', 'CASCADING', 'KELUAR', 'MASUK', 'WAKTU PENYELESAIAN', 'JUMLAH', 'SATUAN', 'JUNILAH (%)', 'REALISASI', 'LAMPIRAN', 'CATATAN MONITORING', 'BOBOT', and 'SCORE(%)'. The table contains data for various indicators and targets, with values ranging from 0 to 100.00. The 'REALISASI' column contains detailed text describing the performance of each indicator.



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Makassar berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Makassar adalah rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2024, Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- a. Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang masih belum menunjang pencapaian sasaran strategis harus dilakukan penyesuaian sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur;
- b. Pemanfaatan aplikasi e-performance harus lebih maksimal dengan menambahkan fitur-fitur yang menunjang penyajian data untuk kebutuhan laporan kinerja terutama proses yang berlangsung dalam pencapaian kinerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja yang optimal perlu dilakukan kajian, analisa, dan evaluasi melalui kegiatan monitoring, pengendalian dan pembinaan secara konsisten dan berkesinambungan dari jajaran atas kepada jajaran bawah;

2. Membuat suatu sistem berbasis teknologi informasi dengan mengoptimalkan sistem informasi yang telah ada guna memudahkan monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas sehingga capaian kinerja yang optimal, efektif, efisien dan berdaya guna serta berhasil guna dapat terpenuhi;
3. Meningkatkan Koordinasi antar seksi/bagian dilingkungan Rudenim Makassar dan Instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan;
4. Inventarisasi masalah-masalah yang terjadi dalam penanganan deteni guna optimalisasi pelayanan dan pengendalian serta penegakan hukum yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2024 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar akan semakin baik dalam hal pelayanan terhadap Masyarakat, sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat akan semakin meningkat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
KANTOR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alimuddin

Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

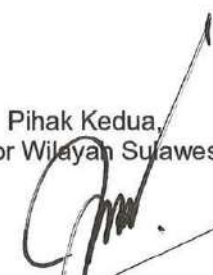
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar


Alimuddin
NIP.196808261994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.651.594.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.651.594.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.420.804.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.420.804.000,-

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberty Sitinjak
NIP.196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar


Alimuddin
NIP.196808261994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alimuddin

Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 18 Januari 2023

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar



Alimuddin
NIP.196808261994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atang Kuswana
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar


Atang Kuswana
NIP. 196706151995031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.249.086.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.249.086.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.535.971.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10.535.971.000,-

Makassar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Selatan


Liberti Sitinjak

NIP. 196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar


Atang Kuswana

NIP. 196706151995031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atang Kuswana

Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 5 Februari 2024

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Atang Kuswana
NIP. 196706151995031002

Prestasi :

Gambar 1 : Piagam Penghargaan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



**Atas prestasinya sebagai Unit Kerja
Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi
Manusia (P2HAM) Tahun 2024**

Gambar 2 : Piagam Penghargaan Kepala Biro Umum Kemenkumham RI

**Atas prestasinya sebagai Peringkat III
Hasil Pengisian Arsip Vital Aplikasi e-
Arsip di Lingkungan Rumah Detensi
Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia**



Gambar 3 : Piagam Penghargaan PLT Direktur Jenderal Imigrasi



Atas prestasinya sebagai satuan kerja dengan Nilai Pengelolaan dan Pelaporan Laporan Harian Inteligen (LHI) Terbaik II Tahun 2021 kategori Rumah Detensi Imigrasi.

Gambar 4 : Piagam Penghargaan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

Atas prestasinya sebagai satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik III Periode Januari s.d Mei T.A 2022



Gambar 5 : Piagam Penghargaan Kepala Kanwil Sulawesi Selatan



Atas prestasinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Terbaik VIII pada Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Gambar 6 : Piagam Penghargaan dari Kepala Dinas Kota Makassar

Atas Prestasinya sebagai instansi yang Informatif dan responsive dalam Mendukung keberhasilan penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar



Gambar 7 : Piagam Penghargaan dari Pimpinan IOM Regional Makassar



Sebagai Mitra Kerja yang berperan aktif dalam pengawasan keimigrasian, sehingga mendukung keberhasilan penanganan pengungsi luar negeri di kota makassar